Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

PENDAMPINGAN ORANG TUA DAN PENGUATAN ULD UNTUK LAYANAN DIGITAL SEKOLAH INKLUSI DI LUMAJANG

Angger Timansah[1]*, Arifah Nurhadiyati[2] Imaratul Ulwiyah[3]

[1,2,3,] Universitas PGRI Argopuro Jember

Email: [1,]anggertimansah@gmail.com, [2,]Riefa.ariefa@gmail.com, [3,]ulwiyahimaratul85@gmail.com

Abstract

Inclusive schools are an effective solution for providing equal access to education for children with special needs amidst the limited number of Special Schools (SLB). Lumajang Regency faces serious challenges in implementing inclusive education, characterized by the absence of a Disability Service Unit (ULD), a shortage of Special Assistant Teachers, lack of teacher training, weak teacher-parent collaboration, and the absence of educational digitalization. This community service activity aims to: (1) provide assistance to parents in utilizing digital services in inclusive schools, (2) encourage the strengthening of ULD in Lumajang Regency, and (3) realize collaboration between teachers, parents, academics, and local government. The activity was conducted over one month (April 6–May 4, 2026) in Jogoyudan Village, Lumajang District, involving 25 parents of children with special needs, 5 Special Assistant Teachers, 5 school principals, and 2 representatives from the Education Office. Methods used included surveys, Focus Group Discussions (FGD), training, simulation, and mentoring. The results showed: (1) the initial condition of parents was very concerning—100% experienced difficulties in mentoring and 92% felt frustrated; (2) there was an increase in parents' understanding of digitalization from an average of 30 to 82; (3) an increase in teachers' understanding of inclusive education from 55 to 89; (4) a stark contrast in satisfaction levels between parents with ULD (85%) and without ULD (15%); and (5) ULD socialization successfully raised local government awareness and school commitment. This activity concludes that parental assistance, digitalization of services, and strengthening of ULD are urgent and interconnected needs. Collaboration between local government, academics, and practitioners is the key to success in realizing quality inclusive education in Lumajang Regency. The main recommendation is the immediate establishment of ULD in Lumajang, the development of sustainable digitalization systems, and the strengthening of cross-sector collaboration.

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

Keywords: Parental Assistance; Digitalization; Disability Service Unit (ULD); Inclusive Schools; Collaboration

Abstrak

Sekolah inklusi merupakan solusi efektif dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus di tengah keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB). Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan serius dalam implementasi pendidikan inklusif, ditandai dengan belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD), minimnya Guru Pendamping Khusus, kurangnya pelatihan guru, lemahnya kolaborasi guru-orang tua, dan belum adanya digitalisasi layanan pendidikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) memberikan pendampingan kepada orang tua dalam pemanfaatan layanan digital di sekolah inklusi, (2) mendorong penguatan ULD di Kabupaten Lumajang, dan (3) mewujudkan kolaborasi antara guru, orang tua, akademisi, dan pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan (6 April–4 Mei 2026) di Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, melibatkan 25 orang tua ABK, 5 GPK, 5 kepala sekolah, dan 2 perwakilan Dinas Pendidikan. Metode yang digunakan meliputi survei, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, simulasi, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan: (1) kondisi awal orang tua sangat memprihatinkan—100% mengalami kesulitan pendampingan dan 92% merasa frustasi; (2) terjadi peningkatan pemahaman orang tua tentang digitalisasi dari rata-rata 30 menjadi 82; (3) peningkatan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif dari 55 menjadi 89; (4) terdapat kesenjangan kepuasan yang sangat kontras antara orang tua dengan ULD (85%) dan tanpa ULD (15%); dan (5) sosialisasi ULD berhasil menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah dan komitmen sekolah. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pendampingan orang tua, digitalisasi layanan, dan penguatan ULD merupakan kebutuhan mendesak yang saling terkait. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas di Kabupaten Lumajang. Rekomendasi utama adalah segera dibentuknya ULD di Lumajang, pengembangan sistem digitalisasi berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: Pendampingan Orang Tua; Digitalisasi; Unit Layanan Disabilitas (ULD); Sekolah Inklusi; Kolaborasi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali. Amanah konstitusi ini semakin dipertegas melalui pengakuan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak memperoleh akses pendidikan yang layak dan setara. Sejalan dengan semangat tersebut, *The Salamanca Statement and Framework*

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

for Action on Special Needs Education, UNESCO menegaskan bahwa sekolah inklusif merupakan sarana paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua.[1] Dokumen ini menjadi tonggak fundamental yang menggeser paradigma pendidikan dari pendekatan segregatif menuju pendekatan inklusif yang menerima seluruh peserta didik tanpa diskriminasi serta menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan layanan pendidikan yang aksesibel, inklusif, dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus pada seluruh jenjang pendidikan.[2] Secara lebih operasional, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat provinsi, mencakup ketentuan tentang tujuan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan pendidikan inklusif di Jawa Timur.[3] Kerangka regulasi ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang ramah disabilitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Lumajang.

Referensi dalam paragraf ini:

Namun, implementasi pendidikan inklusif di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Sari dan Saleh mengidentifikasi lima indikator kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif, yaitu komitmen sekolah, kompetensi guru, sarana prasarana, dukungan orang tua, dan kebijakan daerah.[4] Temuan mereka menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi masih cukup lebar, terutama di daerah yang belum memiliki dukungan kelembagaan yang memadai. Studi lain oleh Aisah dan AB menekankan pentingnya kompetensi guru dalam mengajar siswa dengan berbagai karakteristik melalui pendekatan *differentiated instruction*.[5] Mereka menemukan bahwa guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang memadai lebih mampu mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam di kelas inklusif. Kedua penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya

[1] Federico Mayor, "THE SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS EDUCATION" (Paris, 1994).
[2] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" (2016).
[3] Gubernur, "Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi JawaTimur" (2018).
[4] M Nurul Ikhsan Saleh, "Readiness to Implement Inclusive Education in Muhammadiyah Elementary Schools of Yogyakarta," *Afkaruna* 16, no. 2 (2020): 263–87, https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2020.0124.263-287.
[5] Anita Aisah and D W I Santosa Ab, "Islamic Education in The Inclusive School: Experimental Study of The Application of Differentiated Instruction For Slow Learners," *Afkaruna* 15, no. 2 (2019), https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2019.0106.281-301.

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sekolah, kompetensi guru, dan dukungan sistem yang terintegrasi.

Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa layanan sekolah inklusi di wilayah ini masih jauh dari optimal. Sekolah-sekolah inklusi di Lumajang mengalami keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), minimnya pelatihan pendidikan inklusif bagi guru reguler, lemahnya komunikasi antara guru dan orang tua, serta belum adanya sistem digitalisasi yang menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan pendampingan di rumah. Kondisi ini diperparah dengan belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kabupaten Lumajang, padahal kabupaten/kota lain di Jawa Timur seperti Pasuruan, Malang, Sidoarjo, dan Surabaya telah memiliki ULD sebagai pusat koordinasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.[6] Ketiadaan ULD menyebabkan program-program pendidikan inklusif berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, dan tidak terintegrasi dengan baik.

Dampak dari kondisi ini paling dirasakan oleh orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Bantali dan Athar mengungkapkan bahwa orang tua dengan anak autis mengalami berbagai sumber stres yang kompleks, mulai dari ketidaktahuan tentang kondisi anak, stigma sosial, masalah ekonomi, hingga kekhawatiran tentang masa depan anak.[7] Temuan ini sejalan dengan kondisi di Lumajang, di mana orang tua mengaku kebingungan dan frustasi karena tidak memiliki informasi yang cukup tentang pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah, tidak memiliki panduan untuk mendampingi anak di rumah, dan tidak memiliki saluran komunikasi yang efektif dengan guru. Sebagian besar orang tua (87%) menuntut guru memberikan layanan maksimal, tetapi di sisi lain mereka belum menyadari bahwa keterlibatan aktif orang tua di rumah sama pentingnya dengan peran guru di sekolah. Kondisi ini menciptakan beban yang tidak proporsional pada GPK yang jumlahnya terbatas.

Salah satu solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan ini adalah digitalisasi layanan pendidikan. Penggunaan platform digital dan *e-learning* dapat menjadi penghubung antara pembelajaran di sekolah dan pendampingan di rumah, memungkinkan orang tua mengakses informasi perkembangan anak secara real-time, serta menyediakan panduan pendampingan yang praktis dan mudah diikuti. Junaedi, Sukmono, Sudiwijaya, dan Arifianto menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti *user-generated content* dapat mendukung publikasi dan promosi sekolah inklusi, sekaligus menjadi sarana kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.[8]

[6] Maria Magdalena Dhera et al., "EFEKTIVITAS PELATIHAN BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN SEKOLAH INKLUSI," *JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti* 1 (2023): 50–59, https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jpicb/article/view/2104/607.

[7] Ampun Bantali and Gadis Arniyati Athar, "Coping Strategies for Parents with Autistic Children: A Review from Islamic Psychology," *International Journal of Islamic Educational Psychology* 6, no. 1 (2025): 76–103, https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijiep.v6i1.26077.

[8] Junaedi FSukmono FSudiwijaya EArifianto B, "Perancangan Platform User Generated Content Untuk Publikasi Sekolah Inklusi," *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks* 11, no. 2 (2023): 227–33, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18196/berdikari.v11i2.18598.

Penelitian Aziz, Sugiman, dan Prabowo juga menekankan pentingnya adaptasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, yang dapat difasilitasi melalui pendekatan digital yang terpersonalisasi.[9] Digitalisasi memungkinkan orang tua melanjutkan pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah, sekaligus memberikan kepastian tentang capaian dan perkembangan anak.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi faktor kunci dalam mendukung pendidikan inklusif secara berkelanjutan. Penelitian Saptari tentang peran Unit Layanan Disabilitas di Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa ULD berfungsi sebagai pusat koordinasi, pendampingan, dan penguatan kebijakan yang memastikan penyandang disabilitas memperoleh layanan yang setara.[10] ULD juga berperan dalam memfasilitasi sekolah reguler menjadi sekolah inklusi melalui penyediaan GPK, pelatihan guru, modifikasi kurikulum, dan pengembangan sarana yang aksesibel. Af'idah, Purwoko, dan Hazin menambahkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di daerah memerlukan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.[11]

Berdasarkan pemetaan masalah tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) memberikan pendampingan kepada orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dalam pemanfaatan layanan digital di sekolah inklusi, (2) mendorong penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kabupaten Lumajang melalui sosialisasi dan koordinasi lintas sektor, serta (3) mewujudkan kolaborasi antara guru, orang tua, akademisi, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan di SD Jogoyudan 01 Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, melibatkan orang tua yang mempunyai anak disabilitas intelektual yang bersekolah di sekolah inklusi, Guru Pendamping Khusus, perwakilan sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Diharapkan melalui pendampingan ini, orang tua tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar di rumah, dan terbangun ekosistem pendidikan inklusif yang didukung oleh digitalisasi layanan dan penguatan kelembagaan unit layanan disabilitas.

METODE

Pelaksanaan program ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR dipilih karena sesuai untuk mendorong perubahan sosial melalui

[9] Alfian Nur Aziz and Ardhi Prabowo, "Analisis Proses Pembelajaran Matematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Slow Learner Di Kelas Inklusif SMP Negeri 7 Salatiga," *Kreano:Jurnal Mat Ematika Kreatif - Inovatif* 6, no. 2 (2015): 111–20, https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i2.4168.

[10] Wina Try Saptar, "PERAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA PUSAT DIFUSI INKLUSI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA" (UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2025).

[11] Mufarrihul Hazin Azimatul Af'idah, Budi Purwoko, "Implementing Regional Inclusive Education Policies to Realize Education Without Borders," *Academia Open* 10, no. 1 (2025): 1–16, https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11167.

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

keterlibatan aktif seluruh stakeholder dalam Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Lumajang (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014). Dalam konteks ini, partisipan meliputi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus,unit layanan disabilitas kabupaten lumajang, dan *stakeholder* sekolah inklusi. Metode PAR diimplementasikan melalui siklus yang mencakup empat tahap utama: perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi. Siklus ini digambarkan dalam bagan berikut:

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan orang tua sebagai mitra utama. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi oleh orang tua dan sekolah inklusi di Lumajang bersifat multidimensional dan memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan. Kombinasi metode yang digunakan meliputi survei, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, dan pendampingan, yang dilaksanakan secara bertahap selama satu bulan. Kerangka metodologis ini mengacu pada prinsip-prinsip pengabdian tindakan partisipatif (*participatory action research*) yang menekankan pada kolaborasi antara peneliti dan partisipan dalam mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, dan mengevaluasi hasil.[12]

Kegiatan dilaksanakan di SD Negeri Jogoyudan 01 Lumajang Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, selama periode 6 April hingga 4 Mei 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Lumajang memiliki jumlah sekolah dasar inklusi yang relatif banyak dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Lumajang, namun layanan pendukung bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas. Durasi satu bulan dipilih untuk memungkinkan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan secara memadai, mulai dari identifikasi masalah, pelatihan, simulasi, hingga evaluasi awal. Kegiatan ini melibatkan 25 orang tua yang mempunyai anak disabilitas intelektual yang bersekolah di sekolah inklusi di Kecamatan Lumajang. Selain orang tua, kegiatan juga melibatkan 5 orang Guru Pendamping Khusus dari lima sekolah inklusi, 5 orang kepala sekolah, dan 2 orang perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria: (1) memiliki anak disabilitas intelektual yang terdaftar di sekolah inklusi, (2) bersedia berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan, dan (3) memiliki akses terhadap perangkat komunikasi dasar (ponsel).

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan yang berlangsung setiap minggu. Tahap pertama (minggu 1: 6–12 April 2026) adalah identifikasi dan survei awal. Pada tahap ini, tim melakukan survei untuk memetakan persepsi dan pengalaman orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Survei menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator kesiapan sekolah inklusi dan keterlibatan orang tua yang dikembangkan oleh Sari dan Saleh.[13] Selain itu, tim juga mengidentifikasi

[12] John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approaches* (London: SAGE Publications, 2018).

[13] Saleh, "Readiness to Implement Inclusive Education in Muhammadiyah Elementary Schools of Yogyakarta."

kebutuhan orang tua terkait digitalisasi layanan pendidikan melalui wawancara singkat. Berdasarkan hasil identifikasi, tim menyusun materi pelatihan, modul pendampingan, dan panduan penggunaan platform *e-learning* yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Analisis kekuatan dan kelemahan layanan yang ada juga dilakukan untuk memastikan intervensi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Tahap kedua (minggu 2: 13–19 April 2026) adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pelatihan dasar. FGD dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026 di Aula SD Negeri Jogoyudan 01 Kelurahan Jogoyudan, dipandu dengan pedoman wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan panduan pelaksanaan FGD dari Krueger dan Casey.[14] FGD berlangsung selama 120 menit dan bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam kesulitan yang dihadapi orang tua, harapan mereka terhadap pendidikan anak, serta persepsi mereka tentang kolaborasi dengan guru dan sekolah. Setelah FGD, dilanjutkan dengan pelatihan dasar penggunaan teknologi dan aplikasi digital. Pelatihan ini mencakup pengenalan konsep digitalisasi layanan pendidikan, pengenalan platform *e-learning* yang akan digunakan, dan praktik dasar pengoperasian perangkat. Sebelum dan sesudah pelatihan, tim melakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman orang tua. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi tentang fungsi dan koordinasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) kepada orang tua, guru, dan perwakilan Dinas Pendidikan.

Tahap ketiga (minggu 3: 20–26 April 2026) adalah simulasi dan pendampingan intensif. Simulasi penggunaan platform *e-learning* dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026 di salah satu sekolah inklusi di Kecamatan Lumajang yaitu SD Jogoyudan 01. Simulasi berlangsung selama 3 jam dan mencakup tiga aktivitas utama: mengakses materi pembelajaran yang sudah diunggah guru, mengikuti panduan pendampingan yang disediakan dalam platform, dan mengirim pesan kepada guru melalui fitur komunikasi yang tersedia. Orang tua mendapatkan pendampingan langsung dari tim dalam mengoperasikan platform. Selain simulasi teknis, pada tahap ini juga dilakukan pembekalan strategi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orang tua. Tim memfasilitasi diskusi antara guru dan orang tua untuk menyepakati pola komunikasi yang akan digunakan ke depan, termasuk frekuensi komunikasi, jenis informasi yang akan dipertukarkan, dan mekanisme umpan balik. Koordinasi lintas sektor untuk penguatan ULD juga terus dilakukan dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah inklusi.

Tahap keempat (minggu 4: 27 April – 4 Mei 2026) adalah evaluasi dan monitoring. Pada tahap ini, tim melakukan evaluasi pemahaman dan kemampuan orang tua dalam memanfaatkan digitalisasi pembelajaran melalui *post-test* dan wawancara singkat. Pengumpulan umpan balik dari guru dan orang tua juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan masukan

[14] Richard A. Krueger & Mary Anne Casey, *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

untuk perbaikan ke depan. Tim juga menganalisis dampak pendampingan terhadap kemampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, serta merumuskan rekomendasi penguatan ULD di Kabupaten Lumajang berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Seluruh proses kegiatan didokumentasikan melalui foto dan catatan lapangan sebagai bukti pelaksanaan dan bahan refleksi.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: (1) kuesioner survei untuk mengukur persepsi dan kepuasan orang tua, yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari penelitian Sari dan Saleh dan dimodifikasi sesuai dengan konteks lokal;[15] (2) pedoman wawancara terstruktur untuk FGD yang disusun berdasarkan panduan Krueger dan Casey;[16] (3) lembar observasi partisipatif untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi; (4) instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman orang tua tentang digitalisasi dan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif; serta (5) dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan lapangan. Seluruh instrumen telah melalui proses validasi konten oleh tim ahli yang terdiri dari dosen Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Konseling. Data kuantitatif dari survei dan *pre-test/post-test* dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik sederhana (frekuensi dan persentase), sementara data kualitatif dari FGD, wawancara, dan observasi dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari pengalaman dan persepsi partisipan.[17]

HASIL

Hasil Identifikasi Awal: Kondisi sebelum Pendampingan

Kesulitan Orang Tua dalam Pendampingan

Survei awal pada minggu pertama mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Seluruh orang tua yang menjadi partisipan (100%) mengakui kesulitan mendampingi anak belajar di rumah. Masalah utamanya sederhana namun krusial: tidak ada jembatan informasi antara guru dan orang tua. Mereka tidak pernah benar-benar tahu materi apa yang sudah diajarkan di sekolah pada hari itu. Akibatnya, pendampingan yang mereka berikan terasa seperti menebak tanpa arah yang jelas.

Metode komunikasi antara sekolah dan rumah masih sangat konvensional. Sebagian guru hanya mengandalkan buku catatan kecil yang dibawa pulang anak. Sesekali ada komunikasi lewat telepon jika ada keperluan mendesak. Orang tua mengeluhkan buku catatan tersebut sering kali hanya berisi informasi umum, tanpa detail capaian pembelajaran atau panduan konkret untuk kegiatan di rumah. Proses pembelajaran di rumah pun berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.

Fakta lain yang menarik adalah bahwa 87% orang tua mengaku menuntut guru memberikan layanan maksimal kepada anak mereka. Tuntutan ini muncul dari rasa khawatir dan ketidakberdayaan, karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan

[15] Saleh, "Readiness to Implement Inclusive Education in Muhammadiyah Elementary Schools of Yogyakarta."
[16] Casey, *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*.
[17] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

untuk membantu. Namun di sisi lain, mereka belum menyadari bahwa keterlibatan aktif orang tua di rumah sama pentingnya dengan peran guru di sekolah. Kondisi ini menciptakan beban yang tidak proporsional pada Guru Pendamping Khusus (GPK) yang jumlahnya terbatas, sementara potensi orang tua sebagai mitra pendamping justru belum tergarap.



Gambar 1 Orang tua sedang mengarahkan anak

Seorang ibu yang anaknya duduk di kelas 3 SD mengungkapkan dengan jujur: "Saya nggak pernah tahu anak saya diajar apa di sekolah. Kadang saya tanya, 'Kamu belajar apa hari ini?' Tapi jawabannya nggak jelas. Saya jadi bingung harus ngajari apa di rumah." Pengakuan ini menggambarkan kebingungan yang dialami hampir semua orang tua. Mereka merasa tidak memiliki pegangan dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu anak belajar dengan efektif.

Kebingungan dan Frustasi Orang Tua

Sesi Focus Group Discussion (FGD) pada minggu kedua menjadi ruang curhat yang emosional bagi para orang tua. Dari 25 peserta yang hadir, sebanyak 92% menyatakan dengan gamblang bahwa mereka merasa bingung dan frustasi menghadapi masa depan pendidikan anak. Kebingungan ini bersumber dari satu hal utama: ketiadaan informasi yang cukup dan tepat waktu tentang perkembangan anak di sekolah.

Orang tua mengeluhkan bahwa mereka sering kali baru mengetahui capaian pembelajaran anak setelah rapor dibagikan di akhir semester. Saat itu, sudah terlambat untuk melakukan perbaikan atau intervensi. Tidak ada laporan perkembangan harian atau mingguan yang bisa mereka pantau. Tidak ada saluran komunikasi yang memungkinkan mereka bertanya kepada guru tentang kesulitan yang dihadapi anak di rumah.

Di luar masalah teknis pembelajaran, orang tua juga menyimpan kekhawatiran yang lebih dalam. Mereka bertanya-tanya: apakah anak mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Apakah ada sekolah yang bersedia menerima anak

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

mereka setelah lulus? Bagaimana anak mereka akan bertahan di dunia yang mungkin tidak ramah terhadap perbedaan?

Seorang ayah yang anaknya duduk di kelas 5 SD berkata dengan mata berkaca-kaca: "Saya khawatir, Pak. Anak saya sekarang SD. Nanti kalau lulus, SMP mana yang mau menerima? Saya takut dia nggak sekolah lagi." Seorang ibu lainnya menambahkan dengan suara bergetar: "Saya merasa bersalah setiap hari. Anak saya minta diajarin, tapi saya nggak bisa. Saya cuma bisa pasrah."

Kutipan-kutipan ini menggambarkan bahwa permasalahan pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut aspek teknis-pedagogis, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan mental keluarga. Rasa bersalah, kecemasan, dan ketidakberdayaan menjadi emosi yang dominan dirasakan para orang tua.

Kondisi Sekolah Inklusi di Kabupaten Lumajang

Observasi lapangan dan wawancara dengan guru pada minggu pertama dan kedua mengungkapkan bahwa layanan sekolah inklusi di Lumajang masih menghadapi berbagai kendala serius. Setidaknya ada empat masalah utama yang teridentifikasi dari kegiatan ini.

Keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) sangat terasa. Dari lima sekolah inklusi yang menjadi lokasi pengabdian, rata-rata hanya memiliki satu GPK untuk melayani 15 hingga 25 Anak Berkebutuhan Khusus. Karakteristik hambatan yang dimiliki anak-anak ini pun beragam: ada yang mengalami hambatan intelektual ringan, sedang, hingga disertai gangguan perilaku. Dengan rasio yang sangat timpang ini, GPK tidak bisa memberikan perhatian yang memadai kepada setiap anak.

Minimnya pelatihan pendidikan inklusif bagi guru reguler juga menjadi masalah serius. Dari 35 guru reguler yang menjadi responden, hanya 28% yang pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif. Guru-guru mengakui bahwa mereka merasa tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengajar di kelas inklusi. Mereka tidak tahu cara mengidentifikasi kebutuhan spesifik ABK, mengadaptasi kurikulum, atau mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan hambatan anak.

Belum ada sistem digitalisasi layanan pendidikan di Lumajang. Informasi tentang perkembangan dan pembelajaran anak masih disampaikan secara manual melalui buku catatan yang kadang hilang atau rusak. Tidak ada platform yang bisa diakses orang tua untuk melihat perkembangan anak secara real-time. Unit Layanan Disabilitas (ULD) pun belum terbentuk, padahal kabupaten/kota lain di Jawa Timur seperti Pasuruan, Malang, Sidoarjo, dan Surabaya sudah memilikinya. Ketiadaan ULD menyebabkan program-program yang ada berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, dan tidak terintegrasi.

Pelaksanaan FGD dan Pelatihan Dasar

Pada tanggal 13 April 2026, kegiatan FGD dan pelatihan dasar dilaksanakan di Aula Kelurahan Jogoyudan. Sebanyak 25 orang tua hadir dan semuanya mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. FGD berlangsung selama 120 menit dengan suasana yang hangat namun emosional. Banyak orang tua yang awalnya diam dan malu-malu, tapi perlahan

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

mulai terbuka ketika mendengar cerita dari peserta lain yang memiliki pengalaman serupa.

Antusiasme orang tua terhadap pengenalan digitalisasi pembelajaran sangat tinggi. Ketika tim menjelaskan bahwa akan ada platform digital yang bisa menghubungkan mereka dengan guru, semua peserta menyambut dengan tepuk tangan dan senyuman. Seorang ibu berujar dengan nada haru: "Akhirnya ada yang peduli sama kami. Kami butuh banget bantuan seperti ini."

Dari diskusi yang berlangsung, teridentifikasi tiga masalah utama yang dihadapi orang tua. Pertama, tidak memahami materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah (dialami 92% orang tua). Kedua, tidak memiliki panduan atau modul untuk mendampingi anak di rumah (dialami 88% orang tua). Ketiga, tidak memiliki saluran komunikasi yang efektif dengan guru (dialami 85% orang tua). Ketiga masalah ini saling terkait dan menciptakan siklus ketidakpastian yang terus berulang.

Jenjang pendidikan anak partisipan pun bervariasi: 60% orang tua memiliki anak di SD, 28% di SMP, dan 12% di SMA. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah pendampingan terjadi di semua jenjang pendidikan. Orang tua dengan anak di SD cenderung lebih aktif dan lebih mudah diajak berkolaborasi dibandingkan dengan orang tua dengan anak di SMP dan SMA.

Setelah sesi FGD, dilanjutkan dengan pelatihan dasar penggunaan teknologi dan aplikasi digital. Sebelum pelatihan, tim melakukan pre-test untuk mengukur pemahaman awal orang tua tentang digitalisasi layanan pendidikan. Hasilnya cukup memprihatinkan: rata-rata nilai hanya 30. Setelah pelatihan yang berlangsung sekitar 3 jam, post-test menunjukkan peningkatan yang menggembirakan: rata-rata nilai mencapai 82. Peningkatan sebesar 52 persen ini menunjukkan bahwa orang tua sebenarnya memiliki kapasitas untuk belajar teknologi, asalkan diberikan pendampingan yang sabar.



Gambar 2 Orang Tua yang mempunyai anak disabilitas sedang berdiskusi

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

Sosialisasi tentang fungsi dan koordinasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) juga dilakukan pada kesempatan yang sama. Sebanyak 90% orang tua mengaku baru pertama kali mendengar tentang ULD. Mereka sangat antusias dan mendukung penuh upaya pembentukan ULD di Kabupaten Lumajang.

Pelaksanaan Simulasi dan Pendampingan

Pada tanggal 27 April 2026, simulasi penggunaan platform e-learning dilaksanakan di salah satu sekolah inklusi di Kecamatan Lumajang. Kegiatan ini diikuti oleh 22 orang tua (88% dari total partisipan) dan berlangsung selama 3 jam. Suasana pelatihan terlihat hidup dan interaktif. Orang tua duduk berkelompok, saling membantu satu sama lain ketika ada yang kesulitan mengoperasikan ponsel mereka.

Simulasi mencakup tiga aktivitas utama: mengakses materi pembelajaran yang sudah diunggah guru, mengikuti panduan pendampingan yang disediakan, dan mengirim pesan kepada guru melalui fitur yang tersedia. Hasilnya, 19 orang tua (85%) mampu mengoperasikan platform secara mandiri setelah mendapat pendampingan. Tiga orang tua lainnya (15%) masih mengalami kesulitan karena mereka memang belum terbiasa menggunakan smartphone untuk apa pun selain telepon dan SMS. Tim pengabdian memberikan pendampingan khusus kepada mereka, dan akhirnya mereka pun mulai bisa mengikuti.

Namun, ada dua kendala teknis yang muncul dan perlu dicatat. Masalah akses internet menjadi kendala utama: 40% orang tua mengeluhkan sinyal yang tidak stabil di rumah mereka, terutama bagi yang tinggal di daerah pinggiran atau perbukitan. Masalah perangkat juga tidak kalah penting: 25% orang tua hanya memiliki ponsel dengan spesifikasi rendah yang mungkin tidak bisa mengakses semua fitur platform secara optimal. Beberapa juga mengungkapkan bahwa mereka berbagi ponsel dengan anggota keluarga lain, sehingga akses ke platform tidak selalu tersedia saat dibutuhkan.



Gambar 3 Pelaksanaan pendampingan orang tua

Pada sesi akhir simulasi, tim memfasilitasi diskusi antara guru dan orang tua untuk menyepakati pola komunikasi yang akan digunakan ke depan. Kesepakatan yang tercapai adalah komunikasi rutin melalui platform digital minimal satu kali dalam seminggu. Guru akan mengunggah materi dan catatan perkembangan anak, sementara orang tua akan memberikan umpan balik tentang proses pendampingan di rumah.

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

Hasil Sosialisasi dan Koordinasi ULD

Sosialisasi tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pada tanggal 13 April dan 27 April 2026. Peserta yang terlibat cukup beragam: orang tua ABK (25 orang), Guru Pendamping Khusus dari 5 sekolah (5 orang), perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang (2 orang), dan kepala sekolah dari 5 sekolah inklusi.

Respons dari berbagai pihak cukup menggembirakan. Perwakilan Dinas Pendidikan yang hadir menyatakan bahwa mereka akan mulai mengkaji pembentukan ULD di Lumajang dan mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut. Mereka mengakui bahwa selama ini layanan pendidikan inklusif belum terkoordinasi dengan baik dan tidak memiliki pusat layanan yang terintegrasi.

Lima kepala sekolah yang hadir juga menyatakan kesiapannya menjadi sekolah percontohan untuk implementasi layanan digital dan penguatan ULD. Mereka berjanji akan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Komitmen ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan program ke depan.

Tim juga melakukan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman guru tentang pendidikan inklusif dan peran ULD. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata 55, yang berarti pemahaman guru masih cukup rendah. Setelah sosialisasi dan diskusi intensif, post-test menunjukkan peningkatan menjadi 89. Peningkatan sebesar 34 persen ini menunjukkan bahwa guru memiliki kapasitas untuk belajar dan berkembang jika diberikan akses terhadap informasi dan pelatihan yang memadai.

Yang tidak kalah penting, kegiatan ini berhasil membangun komunikasi awal antara Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, dan akademisi. Para pemangku kepentingan sepakat untuk membentuk tim kerja kecil yang akan menyusun rancangan awal pembentukan ULD di Lumajang. Ini adalah langkah awal yang penting untuk perubahan jangka panjang.

Perbandingan Tingkat Kepuasan Pendampingan

Pada minggu keempat kegiatan (4 Mei 2026), tim melakukan survei kepuasan orang tua untuk mengukur sejauh mana keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) berdampak pada pengalaman mereka dalam mengakses layanan pendidikan inklusif. Hasilnya cukup mencengangkan dan menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara dua kelompok orang tua.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Kepuasan Orang Tua yang Mempunyai Anak Disabilitas

No	Keterangan	Persentase
1	Orang tua dengan keberadaan ULD	85%
2	Orang tua dengan tidak tersedia ULD	15%

***Sumber**: Data Primer Survei Lapangan (2026)*

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

Data di atas menunjukkan bahwa 85% orang tua yang tinggal di daerah yang sudah memiliki ULD merasa puas dan terbantu dengan keberadaan lembaga tersebut. Mereka merasakan manfaat yang nyata: ULD membantu membina dan memfasilitasi sekolah inklusi, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, memberikan kepastian layanan, dan menjadi pusat koordinasi yang bisa diandalkan.

Sebaliknya, di Kabupaten Lumajang yang belum memiliki ULD, hanya 15% orang tua yang merasa puas. Mayoritas (85%) justru merasa kebingungan dan frustasi. Mereka tidak memiliki kepastian layanan, tidak memiliki akses informasi yang memadai, dan tidak memiliki tempat untuk berkonsultasi ketika menghadapi masalah dalam pendidikan anak. Kesenjangan ini sangat mencolok dan menunjukkan urgensi pembentukan ULD.

Seorang orang tua dari daerah yang sudah memiliki ULD berbagi pengalaman: "Saya tinggal datang ke ULD, semua informasi tentang sekolah anak saya bisa saya dapatkan di sana. Saya tidak perlu bolak-balik ke sekolah atau ke dinas pendidikan." Sementara itu, orang tua di Lumajang mengaku sebaliknya: "Saya bingung harus ke mana kalau ada masalah. Ke sekolah? Ke dinas? Saya nggak tahu. Akhirnya saya diem aja dan pasrah."

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua

Dari wawancara mendalam yang dilakukan, setidaknya ada empat faktor utama yang mempengaruhi kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan inklusif. Faktor-faktor ini membantu menjelaskan mengapa kesenjangan kepuasan antara dua kelompok orang tua begitu besar.

Tersedianya pusat koordinasi yang terintegrasi menjadi faktor pertama. Orang tua di daerah dengan ULD tidak perlu repot mencari informasi ke sana kemari. Semua kebutuhan terkait pendidikan anak bisa diakses di satu tempat. ULD berfungsi sebagai one-stop service yang sangat membantu mereka menghemat waktu dan tenaga. Faktor kedua adalah terfasilitasinya sekolah inklusi dengan baik. ULD memastikan sekolah-sekolah inklusi mendapatkan dukungan yang diperlukan: GPK yang memadai, pelatihan guru, modifikasi kurikulum, dan sarana prasarana yang aksesibel. Semua ini membuat orang tua merasa lebih tenang karena anak mereka mendapatkan layanan yang layak. Faktor ketiga adalah terjalinnya kerja sama yang solid antara berbagai pihak. ULD menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan komunitas. Orang tua merasakan adanya sinergi positif di antara para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang mereka terima. Faktor keempat adalah adanya pendampingan yang berkelanjutan. Orang tua tidak ditinggalkan begitu saja setelah anak masuk sekolah. ULD memberikan pendampingan sepanjang jenjang pendidikan, mulai dari konsultasi rutin, pelatihan keterampilan, hingga dukungan psikologis. Pendampingan ini membuat orang tua merasa diperhatikan dan didukung.

Data ini menunjukkan dengan jelas bahwa komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang sangat

besar terhadap kualitas layanan pendidikan bagi anak disabilitas. Ketiadaan ULD di Kabupaten Lumajang bukan hanya masalah administratif, tetapi berdampak langsung pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ABK.

PEMBAHASAN

Digitalisasi sebagai Penghubung Guru dan Orang Tua

Temuan pendampingan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya intervensi digitalisasi, orang tua mengalami kesulitan yang signifikan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Ketidaktersediaan informasi tentang pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah menciptakan jurang pemisah antara apa yang terjadi di sekolah dan apa yang dilakukan di rumah. Kondisi ini diperparah dengan metode komunikasi konvensional yang hanya mengandalkan buku catatan atau komunikasi telepon sesekali, yang terbukti tidak efektif dalam memberikan informasi yang cukup dan tepat waktu kepada orang tua.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, Liftiah, dan Formen yang mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan orang tua menjadi strategi pendukung yang efektif dalam pendidikan inklusif,[18] namun guru sering menghadapi tantangan terkait kompetensi teknologi dan adaptasi media. Dalam penelitian mereka, guru mengintegrasikan teknologi digital melalui media visual interaktif, video edukatif, aplikasi pembelajaran, dan permainan edukatif digital yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Namun, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital guru menjadi kendala yang perlu diatasi melalui pelatihan dan dukungan institusi yang memadai.

Pendampingan ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa orang tua sebenarnya memiliki kapasitas untuk belajar teknologi, asalkan diberikan pendampingan yang sabar dan bertahap. Peningkatan pemahaman orang tua dari rata-rata 30 menjadi 82 setelah pelatihan menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat mengatasi kesenjangan literasi digital. Namun, kendala teknis seperti keterbatasan akses internet (40% orang tua) dan keterbatasan perangkat (25% orang tua) menjadi tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi layanan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Teknologi digital dalam pendidikan inklusif memiliki potensi besar untuk menjadi "jembatan" yang menghubungkan sekolah dan rumah. Platform daring dan software edukatif memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang dan kebutuhan untuk belajar bersama, saling mendukung, dan mengakses materi sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam konteks Lumajang, platform *e-learning* yang diperkenalkan dalam kegiatan ini berfungsi sebagai sarana bagi guru untuk mengunggah materi pembelajaran dan catatan perkembangan anak, serta bagi orang tua untuk mengakses

[18] Ali Formen Rahmawati Rahmawati, Liftiah Liftiah, "Strategi Guru Dalam Mengintegrasikan Teknologi Digital Pada Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusi," *Didaktika Dwija Indria* 14, no. 4 (2026).

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

informasi tersebut dan memberikan umpan balik.[19] Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi alat transfer informasi, tetapi juga sarana kolaborasi yang memperkuat keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak.

Temuan paling mencengangkan dari pendampingan ini adalah kesenjangan kepuasan yang sangat kontras antara orang tua yang memiliki akses terhadap Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan mereka yang tidak. Sebanyak 85% orang tua di daerah yang sudah memiliki ULD merasa puas dan terbantu, sementara di Kabupaten Lumajang yang belum memiliki ULD, hanya 15% yang merasa puas. Kesenjangan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari realitas bahwa ULD memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ishartiwi yang mengkaji fungsi ULD dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Yogyakarta. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 70% pemangku kepentingan pendidikan inklusif hanya memahami karakteristik fisik anak berkebutuhan khusus dan mengaku masih bingung dengan keragaman karakteristik untuk setiap jenis kebutuhan khusus. Sebanyak 42% subjek hanya memahami hakikat pendidikan inklusif, tetapi masih belum memahami persyaratan detailnya. Lebih jauh, 72-97% pemangku kepentingan berharap ULD-RC (Resource Center) memperjelas posisi kelembagaan, membangun sistem layanan, merancang struktur kelembagaan yang lebih fleksibel, dan memperjelas kewenangan.[20]

Aspirasi pemangku kepentingan mengenai fungsi ULD-RC mencakup fungsi informasi, layanan konsultasi, identifikasi dan asesmen, keterampilan kerja sebagai institusi transisi, pengembangan kurikulum dan program pembelajaran, serta layanan masalah sekolah inklusif. Temuan ini relevan dengan kondisi di Lumajang, di mana orang tua mengeluhkan ketiadaan informasi, ketiadaan tempat konsultasi, dan ketiadaan kepastian layanan. Keberadaan ULD di daerah lain terbukti mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga orang tua merasa lebih tenang dan terbantu.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberadaan ULD sangat strategis sebagai jembatan yang memastikan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan setara. Namun, ia juga menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. "Optimalisasi ULD tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. Unit ini harus benar-benar responsif, berkelanjutan, dan mampu menghapus hambatan yang dihadapi peserta didik disabilitas," tegasnya. Dengan demikian, ULD dapat menjadi motor penggerak inklusi, kesetaraan, dan keadilan dalam pendidikan.

---

[19] Nining Andriani Slamet Riyadi, Al Munip, Ahmad Junaidi, Taslim Buaja, Syahrial Shaddiq, "TRANSFORMASI PENDIDIKAN LUAR BIASA DI ERA DIGITAL: INKLUSI DAN TEKNOLOGI DI TAHUN 2025," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 6, no. 1 (2025): 1211–22.

[20] Ishartiwi, "Fungsi Unit Layanan Disabilitas Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif," *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus* 19, no. 1 (2023): 7–19, https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk.

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti juga menekankan bahwa ULD tidak boleh hanya hadir sebagai struktur administratif semata, melainkan benar-benar menjadi mitra sekolah, guru, dan orang tua. "Dengan advokasi ini, kita dorong agar ULD hadir nyata dan manfaatnya dirasakan langsung oleh murid, guru, orang tua, dan masyarakat," imbuhnya. Saat ini, sudah terdapat 32 provinsi dan 461 kabupaten/kota yang memiliki SK Pembentukan ULD. Namun, masih ada ULD yang belum berfungsi optimal karena keterbatasan program kerja, standar operasional, dan anggaran. Kabupaten Lumajang, yang belum memiliki ULD sama sekali, tentu berada pada posisi yang lebih tertinggal**.**

Pendampingan ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi menjadi faktor kunci dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif. Di Lumajang, keterlibatan akademisi dari Universitas PGRI Argopuro Jember, praktisi dari sekolah-sekolah inklusi, dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menjadi langkah awal yang penting dalam membangun ekosistem pendidikan inklusif yang terintegrasi.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Hetifah Sjaifudian yang mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tatang Muttaqin juga menekankan bahwa diperlukan strategi advokasi yang sistematis, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak. Melalui forum advokasi, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, penguatan komitmen, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Dalam konteks Lumajang, sosialisasi dan koordinasi ULD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berhasil membangun komunikasi awal dan kesepakatan untuk membentuk tim kerja kecil yang akan menyusun rancangan awal pembentukan ULD. Perwakilan Dinas Pendidikan menyatakan komitmen untuk mengkaji pembentukan ULD dan mengalokasikan anggaran. Lima kepala sekolah menyatakan kesiapan menjadi sekolah percontohan. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menjadi katalis perubahan, bahkan di daerah yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur kelembagaan yang memadai.

Peningkatan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif dari rata-rata 55 menjadi 89 setelah sosialisasi juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan akademisi sebagai fasilitator pengetahuan. Guru-guru yang sebelumnya merasa tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengajar di kelas inklusi, setelah mendapatkan informasi dan pelatihan, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan kompetensi guru bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi, asalkan ada komitmen dan dukungan dari berbagai pihak.

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

Lebih jauh, Ainscow dan Sandill dalam penelitian mereka tentang pengembangan sistem pendidikan inklusif menekankan peran budaya organisasi dan kepemimpinan dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.[21] Tanpa dukungan kepemimpinan dari pemerintah daerah dan komitmen dari sekolah-sekolah, upaya-upaya sporadis dari akademisi dan praktisi akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan ini perlu terus diperkuat dan dilembagakan agar dampaknya tidak berhenti pada tataran proyek, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan di Kabupaten Lumajang.

Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan waktu (satu bulan) menjadi kendala dalam melakukan pendampingan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kedua, jumlah partisipan yang terbatas (25 orang tua) berarti temuan ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Kabupaten Lumajang. Ketiga, keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat, menjadi hambatan nyata dalam implementasi digitalisasi secara luas.

Tantangan-tantangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh penelitian Rahmawati, Liftiah, dan Formen bahwa keterbatasan infrastruktur dan literasi digital guru dan orang tua perlu diatasi melalui pelatihan dan dukungan institusi yang memadai.[22] Penelitian tentang implementasi certainty factor dalam program edukasi digital sehat juga menemukan bahwa guru dan orang tua di sekolah inklusi sering kali belum memiliki literasi digital yang memadai untuk mendampingi anak secara tepat.

Selain itu, masih terdapat 19,48% anak disabilitas usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah, dan angka tersebut meningkat pada usia 13-15 tahun (41,9%) dan usia 16-18 tahun (69,24%). Data ini menunjukkan bahwa masalah akses pendidikan bagi anak disabilitas masih sangat besar di Indonesia, dan upaya-upaya seperti yang dilakukan dalam kegiatan ini hanyalah sebagian kecil dari solusi yang diperlukan. Dari ribuan sekolah inklusif yang ada, baru sekitar 14,83% yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK). Keterbatasan GPK di Lumajang, yang rata-rata hanya satu GPK untuk melayani 15-25 ABK, mencerminkan kondisi nasional yang masih jauh dari ideal.

Keterbatasan lain yang perlu dicatat adalah bahwa evaluasi dampak kegiatan ini baru dilakukan pada tahap awal, belum ada pengukuran dampak jangka panjang terhadap capaian belajar anak atau perubahan signifikan dalam pola pendampingan orang tua. Penelitian lebih lanjut dengan desain longitudinal diperlukan untuk mengukur keberlanjutan dampak dari intervensi yang telah dilakukan. Meskipun demikian, kegiatan ini telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan

[21] Mel & Abha Sandill Ainscowa, "Developing Inclusive Education Systems: The Role of Organisational Cultures and Leadership," *International Journal of Inclusive Education* 2, no. 918522989 (2010), https://doi.org/10.1080/13603110802504903.
[22] Rahmawati Rahmawati, Liftiah Liftiah, "Strategi Guru Dalam Mengintegrasikan Teknologi Digital Pada Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusi."

Ngabekti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2026
E-ISSN: 3031-0806

masalah, membangun kesadaran, dan meletakkan fondasi bagi perubahan yang lebih sistemik di Kabupaten Lumajang.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, terdapat beberapa implikasi penting bagi pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Lumajang dan daerah lain dengan kondisi serupa. *Pertama*, pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kabupaten Lumajang merupakan kebutuhan yang mendesak, bukan pilihan. Data kesenjangan kepuasan 85% vs 15% menunjukkan bahwa ULD memiliki dampak nyata terhadap kualitas layanan dan kesejahteraan keluarga ABK. Pemerintah daerah perlu segera menginisiasi pembentukan ULD dengan dukungan regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang ditekankan oleh Kemendikdasmen, ULD tidak boleh hanya hadir sebagai struktur administratif semata, melainkan benar-benar menjadi mitra sekolah, guru, dan orang tua.

Kedua, digitalisasi layanan pendidikan perlu terus dikembangkan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Keterbatasan akses internet dan perangkat yang dialami oleh 40% dan 25% orang tua menunjukkan bahwa digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata, termasuk akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai, terutama di daerah pinggiran. Pelatihan literasi digital bagi orang tua dan guru juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sekali.

Ketiga, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat dan dilembagakan. Keterlibatan akademisi dalam kegiatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman orang tua dan guru, serta membangun kesadaran pemerintah daerah. Forum-forum kolaborasi seperti ini perlu dijadikan agenda rutin, tidak hanya bersifat proyek insidental. Seperti yang disarankan oleh Tatang Muttaqin, diperlukan strategi advokasi yang sistematis, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak.

Keempat, penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari intervensi digitalisasi dan penguatan ULD. Desain longitudinal dengan sampel yang lebih besar dan beragam akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas berbagai strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang telah berjalan tetap relevan dan efektif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menjawab tujuan kegiatan. Pertama, kondisi awal orang tua ABK di Lumajang sangat memprihatinkan: mereka mengalami kesulitan berat dalam mendampingi anak belajar di rumah karena ketiadaan informasi dan sistem pendukung. Kedua, intervensi pendampingan dan pelatihan digitalisasi terbukti efektif meningkatkan pemahaman

orang tua tentang pemanfaatan layanan digital, dari rata-rata 30 menjadi 82. Ketiga, kolaborasi antara guru dan orang tua terbangun melalui platform digital yang memungkinkan komunikasi rutin dan berbagi informasi tentang perkembangan anak. Keempat, penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, sebagaimana tercermin dari kesenjangan kepuasan orang tua yang sangat kontras: 85% orang tua di daerah dengan ULD merasa puas, sementara di Lumajang yang belum memiliki ULD hanya 15% yang merasa puas.

Kelima, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah tentang urgensi ULD dan mendorong komitmen sekolah-sekolah inklusi untuk menjadi percontohan. Keenam, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mendorong perubahan, dengan terbentuknya komunikasi awal dan kesepakatan untuk membentuk tim kerja penyusunan rancangan ULD di Lumajang.

DAFTAR RUJUKAN

Ainscowa, Mel & Abha Sandill. “Developing Inclusive Education Systems: The Role of Organisational Cultures and Leadership.” *International Journal of Inclusive Education* 2, no. 918522989 (2010). https://doi.org/10.1080/13603110802504903.

Aisah, Anita, and D W I Santosa Ab. “Islamic Education in The Inclusive School: Experimental Study of The Application of Differentiated Instruction For Slow Learners.” *Afkaruna* 15, no. 2 (2019). https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2019.0106.281-301.

Azimatul Af’idah, Budi Purwoko, Mufarrihul Hazin. “Implementing Regional Inclusive Education Policies to Realize Education Without Borders.” *Academia Open* 10, no. 1 (2025): 1–16. https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11167.

Aziz, Alfian Nur, and Ardhi Prabowo. “Analisis Proses Pembelajaran Matematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Slow Learner Di Kelas Inklusif SMP Negeri 7 Salatiga.” *Kreano:Jurnal Mat Ematika Kreatif -Inovatif* 6, no. 2 (2015): 111–20. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i2.4168.

B, Junaedi FSukmono FSudiwijaya EArifianto. “Perancangan Platform User Generated Content Untuk Publikasi Sekolah Inklusi.” *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks* 11, no. 2 (2023): 227–33. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18196/berdikari.v11i2.18598.

Bantali, Ampun, and Gadis Arniyati Athar. “Coping Strategies for Parents with Autistic Children: A Review from Islamic Psychology.” *International Journal of Islamic Educational Psychology* 6, no. 1 (2025): 76–103. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijiep.v6i1.26077.

Casey, Richard A. Krueger & Mary Anne. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed*

M Ethods Approaches. London: SAGE Publications, 2018.

Dhera, Maria Magdalena, Maria Karmelita Ndoya, Yovita Awu, Ulrikus Nono, Program Studi, Pendidikan Guru, and Sekolah Dasar. "EFEKTIVITAS PELATIHAN BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN SEKOLAH INKLUSI." *JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti* 1 (2023): 50–59. https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jpicb/article/view/2104/607.

Gubernur. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi JawaTimur (2018).

Ishartiwi. "Fungsi Unit Layanan Disabilitas Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif." *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus* 19, no. 1 (2023): 7–19. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk.

Mayor, Federico. "THE SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS EDUCATION." Paris, 1994.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016).

Rahmawati Rahmawati, Liftiah Liftiah, Ali Formen. "Strategi Guru Dalam Mengintegrasikan Teknologi Digital Pada Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusi." *Didaktika Dwija Indria* 14, no. 4 (2026).

Saleh, M Nurul Ikhsan. "Readiness to Implement Inclusive Education in Muhammadiyah Elementary Schools of Yogyakarta." *Afkaruna* 16, no. 2 (2020): 263–87. https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2020.0124.263-287.

Saptar, Wina Try. "PERAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA PUSAT DIFUSI INKLUSI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA." UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2025.

Slamet Riyadi, Al Munip, Ahmad Junaidi, Taslim Buaja, Syahrial Shaddiq, Nining Andriani. "TRANSFORMASI PENDIDIKAN LUAR BIASA DI ERA DIGITAL: INKLUSI DAN TEKNOLOGI DI TAHUN 2025." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 6, no. 1 (2025): 1211–22.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.